

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Solopos

Wilayah Berita : Kabupaten Sragen

Halaman 14

Tunggakan PBB Rp13,5 Miliar

SRAGEN - Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2018 di Sragen masih kisaran Rp 13,5 miliar. Pasalnya dari target pendapatan Rp 17,5 miliar, baru menarik PBB sebesar Rp 4 miliar. Untuk mengejar target penarikan PBB itu, Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Sragen menggandeng toko modern untuk pembayaran PBB. Selain gandeng 57 toko modern, juga memberikan bonus bagi desa yang dapat menyelesaikan penarikan PAD tersebut.

Kepala BPPKAD Sragen Dwiyanto menyampaikan kerjasama tersebut tengah dirintis dan diharapkan pada pertengahan tahun sudah dapat terlaksana. Dia menjelaskan dengan jaringan ritel toko modern yang mencakup hampir seluruh Indonesia. "Jadi WP (wajib pajak) yang berada di luar kota, tidak harus kemari, bisa membayar lewat toko modern," terangnya, kemarin. Dia menyampaikan kerjasama juga sudah dilakukan dengan kantor pos dan Bank Jateng. Pihaknya menyampaikan sistem inovasi ini sudah berjalan di sejumlah kabupaten lain. Salah satunya Sidoarjo Jawa Timur. Diharapkan dengan kemu-

dahan ini bisa memangkas tunggakan PBB.

Selain ini sampai April ini dia menyampaikan dari PBB sudah menyumbang Rp 4 miliar dari target akhir tahun Rp 17,5 miliar. Selain itu semangat dari perangkat desa dalam menarik PBB menjadi faktor penting.

Dia menyampaikan salah

satu yang pembayaran PBB cukup memuaskan dari kecamatan Gemolong. "Salah satunya Kecamatan Gemolong untuk tingkat pembayaran PBB nomor satu dari 20 kecamatan. Dulu untuk PBB biasanya Gemolong terakhir, sekarang malah jadi nomor satu, peran dari Camat juga," bebarnya.

Dia menyampaikan hingga

akhir Mei nanti, desa yang sudah melunasi PBB 100 persen akan mendapat reward Rp 4 juta per desa. Selain itu wajib pajak juga mendapatkan hadiah dengan pengundian atas ketaatan membayar pajak. "Pembayaran PBB di desa menjadi syarat dengan ADD maka desa juga bersemangat," tuturnya. (ars/saf)